

Edisi 46/XXVII/SEPTEMBER 2012

BALAIRUNG

www.balairungpress.com

CAT

Tarik Ulur Eksekusi Tambang Kulon Progo

19

Riset

Anomali Pemberitaan
Pasir Besi

51

Apresiasi

Aku Ingin Menjadi
Kupu-kupu

eStore



Authorised
Reseller

Get Our **SPECIAL PROMO!**

Visit Our Store and Facebook for more info



eStore now open at Yap Square Building B7

Apple Authorised Reseller (0274) 912 8155 | Apple Service Provider (0274) 8200 788



www.estimate.co.id



info@estimate.co.id



[estimate](https://www.facebook.com/estimate)



[@estimate_id](https://twitter.com/estimate_id)

Selamat Datang
Mahasiswa Biasa Saja
di Kampus yang
Biasa Saja !



Daftar Isi

Editorial

Laga Kaum Tani 6

Laporan Utama

Jalan Panjang Megaprojek Kulon Progo 8
Tarik Ulur Eksekusi Tambang Kulon Progo 12

Sisi Lain

Menolak Tambang demi Alam 16

Riset

Anomali Pemberitaan Pasir Besi 19

Apresiasi

Aku Ingin Menjadi Kupu-kupu 26

Eureka

Menyusuri Jejak Perubahan Simego 28

Bunga Rampai

Titanium dan Pasir Besi Dikeruk, 36
Kaum Tani Pesisir Selatan Berseru: "Bertani atau Mati!"

Susahnya Hidup di Tanah Raja 40

Telaah Kritis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY 44

Opini

Di Bawah Bayang Illusi 48

Sosok

Eka Kurniawan: Menulis Tanpa Putus Asa 50

Laporan Khusus

Mooikitchen: Lebih dari Sekadar Cantik 52

Sastra

Kulminasi Memori 54

Rehal

Guru: Aktor yang Terlupakan 58

Lain-Lain



BALAIRUNG

Pembina

Drs. Kuskridho Ambardi, M. A.

Pemimpin Umum

M. Adhi Pratama

Koordinator Majalah Balairung

M. Misbahul Ulum

Tim Kreatif Majalah

Errina Puspitasari
Medikantyo Junandika A.
Purnama Ayu Rizky
Wiwit Endri

Pemimpin Redaksi

Fitria Nurhayati

Editor

Ali, Ariesta Budi, Ayu Budi Kusuma W., Deni Cahyono, Diaz Bela Yustisia
Didik Srihartopo, Dini Prima Yuniarsih, Elizabeth Winda Nainggolan,
Muhammad Adib, Pepri Saputra, Taufik Al Zurjani

Penulis

Dwi Kharisma Michellia, Ferdi Febiano Anggriawan,
Fransisca Mutiara Damarratni Hanindya Nafiaani,
Hesa Adrian K., Ibnu Hajjar Al-asqolani, Linna Permatasari
Muhammad Irfan, Muhammad Luthfi Ardyanto, Ratih Wilda Oktaliana
Risky Ahmad, Sonia Fatmarani

Kepala Riset

Anif Akbar JP

Editor

Muharrirah

Penulis

Beniardi Nurdiansyah, Dennis, Muhammad Nafi
Nur Rosyid, Luqman Zaqi Jatibenang

Pemimpin Perusahaan

M. Nikmatul Mu'minin Fadly

Kepala Bagian Keuangan

Lady Danker

Staf Perusahaan

Astnan, Desty, Fajar, Feby, Herman,
Inka, Nur, Nurul, Ummi

Kepala Produksi dan Artistik

Ik. Daniel Fahmi Rizal

Redaktur Artistik

Faizal Afnan

Desain Grafis

Afdi Alfian, Afriana Dwi Cahyani, Humam Fauzi
Tomi S. W., Tommy Gustaviano Yeza,
Rindiawan Uji P., Muchammad Fahmi Habibi

Ilustrator

Eka Apriliaawan, Lukas Alfario S. D.
Tara Arani Faza, Anis Nur Muhammad

Fotografer

Anugrahani Tri Hapsari, Bhayu Satria Andiprayogo
Hary Prasajo Syala'atillah, Regi Yanuar Widhia Dinnata
Stephanie R. Lumbantoruan, Wulan Septiningtyas K.

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan & Promosi

Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281

Faximile: 0274 566171

Website: www.balairungpress.com

E-Mail: balairungpress@gmail.com

Kontak: +6285693813790 (Fadly)

Bank BNI

0258228557

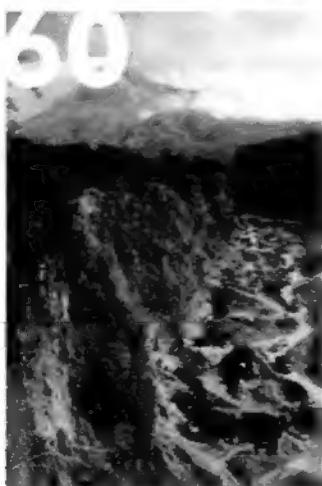
a.n Wiwit Endri Nuryaningsih

Silahkan kirim surat pembaca, kritik dan saran Anda ke:

E-Mail: balairungpress@gmail.com

Kontak: +6285743400995 (Ulum)

Sampul



res 59
Kilas 60
Si lyik 62
Interupsi 62

Laga Kaum Tani

Berbicara pergerakan di Indonesia, juga berbicara soal gerakan agraria yang salah satu basisnya adalah petani. Sebuah gerakan yang keberadaannya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Jatuh banggunya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan didapat. Disertasi Sartono Kartodirjo misalnya, bercerita detail mengenai perlawanan petani di Banten pada 1888. Perlawanan ini terjadi seperti halnya gerakan petani lainnya, dikarenakan penindasan, kesengsaraan, dan kemiskinan yang sudah terakumulasi. Meski pada akhirnya, perlawanan itu berakhir dengan kekalahan karena pihak kolonial menjalin aliansi dengan penguasa lokal.

Kemudian di zaman kemerdekaan, Barisan Tani Indonesia (BTI) muncul. Kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan gerakan massa rakyat dalam revolusi Indonesia. BTI dengan aliansinya menjadi pendukung program pemerintah dalam reforma agraria pascadisahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Mereka juga menggerakkan masyarakat pedesaan untuk menduduki tanah-tanah milik swasta dan menuntut adanya distribusi. Di tahun-tahun ini organisasi petani mencapai puncak yang

mengesankan. Gerakan petani bersatu padu dengan pemerintah. Bung Karno bahkan mengelu-elukan mereka sebagai sokoguru revolusi. Koalisi apik ini dilatarbelakangi suasana politik Indonesia yang sedang menyatukan berbagai elemen untuk mengukuhkan kemerdekaan.

Saat Soekarno jatuh dan Soeharto mengambil kekuasaan di tahun 1965, organisasi dan gerakan tani mengalami kemunduran. Pasalnya, banyak aktivis BTI dan organisasi penggerak agraria lainnya dibunuh dengan tuduhan komunis. Ironis, keberadaan mereka dimatikan atas dasar penilaian sepihak. Kejadian itu lantas melumpuhkan semangat juang para petani dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Penderitaan petani bertambah karena agenda reforma agraria dalam UUPA yang menyerahkan tanah pada rakyat hanya tampil sebagai tulisan tanpa praktik di lapangan. Walaupun ada, pemilihan pasalnya selektif, mana yang bisa menguntungkan pembangunan itulah yang diambil. Ditambah, kelembagaan dan hukum dikontrol dan didepolitisasi. Organisasi independen petani diberangus dan diganti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Siapa petani yang tak masuk HKTI, jangan harap kesejahteraan pertaniannya terjamin. Siapa saja yang

membangun organisasi di luar HKTI, jangan harap bisa berjalan tenang tanpa diskriminasi.

Kontrol yang besar dan kuat ini menjadikan protes masyarakat tak pernah didengar. Walaupun digubris, suara yang diperdengarkan berasal dari senapan. Posisi sebagai objek pembangunan distempel secara otoriter pada masyarakat. Meski demikian, mereka tetap melakukan agenda perlawanan. Pembangkangan membayar pajak, mogok makan, aksi demonstrasi, merusak fasilitas pemerintah, penolakan dipindahkan dari tanahnya, pengambilan kembali tanah, pendudukan tanah, bahkan sampai perlawanan fisik dilakukan.

Setelah Soeharto digulingkan, reformasi dan hawa segar demokrasi tentu saja membawa banyak harapan baru bagi para penggerak reforma agraria. Desentralisasi sebagai buah reformasi—yang berarti pelimpahan wewenang pada pemerintah daerah, disambut hangat. Banyak pihak berasumsi bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyat sehingga memahami budaya dan kebutuhan rakyatnya. Kedekatan itu kemudian diasumsikan juga berimplikasi keberpihakan pada rakyat. Namun yang





BALAIRUNG/Daniel

terjadi malah sebaliknya. Desentralisasi malah berbuah dominasi baru, dominasi penguasa lokal.

Kekuatan desentralisasi yang memiliki wewenang memutuskan pendapatan daerah berasal dari mana saja berdampak negatif pada sebagian kasus. Dampak negatif muncul dari kepongahan pemerintah daerah yang tidak melihat persoalan secara integral. Mereka hanya melihat keuntungan dari satu-dua pihak dan melupakan kerugian yang didapat pihak lain. Rencana pengambilalihan fungsi lahan pesisir pantai Kulon Progo contohnya. Kepongahan terlihat dari sikap pemerintah yang tidak mengindahkan peraturan dan berbagai penolakan yang dilakukan banyak elemen.

Nyatanya, peraturan tinggal peraturan. Rencana penambangan pasir besi tetap dilakukan. Penduduk setempat yang notabene menjadi petani lahan pantai juga sudah melakukan penolakan dengan beragam cara. Dialog, konsultasi publik, audiensi dengan komisi VII DPR RI, demonstrasi, aksi blokir jalan, pendudukan kantor DPRD,

sudah dilakukan. Namun rencana penambangan tetap diteruskan.

Persoalan keuntungan ekonomi seolah membutakan mata para penguasa. Mengeruk keuntungan sebesar-besarnya seolah menjadi agenda utama. Persoalan sosial masyarakat, persoalan dampak lingkungan, bisa menjadi nomor sekian. Teriakan petani yang berusaha mempertahankan lahannya dianggap angin lalu. Perlawanan petani yang berjuang mempertahankan ekosistem pun diacuhkan.

Fakta-fakta ini mengukuhkan bahwa petani, pejuang agraria, adalah kaum subaltern. Kaum yang didefinisikan Antonio Gramsci sebagai kaum yang tak memiliki akses pada kebijakan. Diam ditindas, bersuara pun tak didengar. Perjuangan mereka memang membutuhkan banyak aliansi untuk berjuang bersama. Karena desakan dari penyatuan berbagai kekuatan bisa jadi mampu menolehkan kepala para penguasa. Semua usaha itu tentu saja harus diiringi sikap legowo pemerintah untuk menurunkan tingkat dominasi pada rakyatnya. **[Redaksi]**

Jalan Panjang Megaproyek Kulon Progo

Penulis: Hanindya Naafiani, Hesa Adrian Kaswanda, Linna Permatasari.

Di tengah harapan untuk memaksimalkan potensi Kulon Progo, kehadiran megaproyek justru berdampak pada berbagai perubahan.



Ketika ditemui Kamis (24/5), Drs. H. Toyo Santoso Dipo, Bupati Kulon Progo Periode 2001-2011, mengeluh,

“Pemuda Kulon Progo pergi keluar karena tidak ada lahan yang bisa digarap.” Padahal, mayoritas masyarakat Kulon Progo bermatapencaharian sebagai petani. Namun, pengolahan lahan pertanian masihlah belum tergarap dengan baik. Keadaan ini diperparah oleh dominannya masyarakat berusia tua yang tinggal di Kulon Progo. Kesejahteraan masyarakatnya pun masih rendah karena pemuda terdidik juga lebih memilih untuk mengembangkan daerah di luar Kulon Progo.

Tuntutan pemerataan kesejahteraan membuat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) merancang proyek-proyek pembangunan di daerah-daerah kabupaten. Selama ini, daerah kabupaten yang hanya menjadi daerah perlintasan dipilih sebagai tempat pelaksanaan proyek. Daerah pembangunan proyek-proyek meliputi kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo.

Demi pemerataan pembangunan daerah-daerah kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY disusun pada tahun 1992. Namun, dalam perjalanannya RTRW yang telah disusun tak lagi sesuai dengan keadaan saat ini. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan wilayah DIY. Akhirnya, dilakukan penyusunan kembali RTRW Provinsi DIY yang dimulai 2007 dan selesai pada 2009.

RTRW Provinsi DIY pun disahkan tahun 2010. Dalam RTRW tersebut, dijelaskan bahwa rentang waktu pembangunan proyek dimulai dari 2009 sampai 2029. Selain itu, RTRW membagi kabupaten-kabupaten DIY dengan pengkhususan bidang pembangunan. Kabupaten Gunung Kidul difokuskan untuk pengembangan wisata bahari, sedangkan pusat pendidikan banyak berlokasi di Kabupaten Sleman. Lalu, Kabupaten Bantul memfokuskan pembangunan pada sektor Unit Menengah Kegiatan Masyarakat dan

Kabupaten Kulon Progo menjadi tempat pembangunan megaprojek pelabuhan laut, bandara, dan penambangan pasir besi. Saat ini, penggarapan proyek di Kulon Progo telah berjalan.

Pemilihan Kulon Progo sebagai tempat pelaksanaan megaprojek dilandasi dengan banyak alasan. “Kulon Progo memiliki lahan yang luas dan belum dikembangkan,” jelas Ir. Subagyo, Kepala Penanaman Modal Kabupaten Kulon Progo. Lahan-lahan yang belum tergarap itulah yang menjadi tempat pembangunan proyek. Sekarang proyek yang sudah mulai dilaksanakan adalah penambangan pasir besi. Dalam pelaksanaannya, penambangan pasir besi banyak menuai kontroversi.

Konflik tambang di Kulon Progo yang menjadi salah satu dari megaprojek menjadi isu nasional, bahkan mendapat perhatian dari negara lain. Meski mulai tereduksi, konflik tersebut masih belum menemui titik temu. Desa Garongan, menjadi saksi bagaimana konflik tersebut menggeliat. Untuk menuju desa yang mayoritas penduduknya petani pesisir ini diperlukan waktu tempuh dua jam. Beberapa ruas jalan menuju Desa Garongan sengaja diperlebar untuk mempermudah akses transportasi. Sisi kanan-kiri jalan masih terhampar sawah dengan aktivitas yang tak padat. Memasuki Desa Garongan, nuansa konflik menyeruak. Di pinggir jalan banyak tulisan penolakan tambang pasir besi. Desa Garongan merupakan desa yang dilewati sebelum menuju Desa Karangwuni, tempat pelaksanaan *pilot project* PT Jogja Magasa Iron (JMI) melakukan penambangan pasir besi.

JMI adalah perusahaan kontrak karya yang menggarap proyek penambangan di Kulon Progo. Dalam prosesnya, JMI menggunakan sistem blok. Lahan yang akan ditambang dibagi menjadi beberapa blok. Setiap blok akan digarap secara bertahap selama kurang lebih dua sampai tiga tahun. Pasca-penambangan blok, lahan akan direklamasi dan dikembalikan ke pemiliknya. Menurut Ir. Heru Darmawanta, MT, Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DIY, JMI berjanji akan mengembalikan tanah dalam

kondisi yang lebih subur. “Tujuannya agar setelah selesai ditambang, masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam,” jelas Heru ketika ditemui di kantornya.

Industri pendukung berupa pabrik pengolahan biji besi menjadi baja pun dipersiapkan. Ide tersebut digagas oleh Kementerian Industri sebagai tindak lanjut penambangan pasir besi. “Diharapkan ada nilai tambah untuk biji besi, bukan lagi dijual dalam bentuk mentah, namun berbentuk batangan yang berguna untuk konstruksi bangunan,” ungkap Heru.

Di sisi lain, Desa Garongan juga menjadi pusat kelembagaan Paguyuban Petani Lahan Pesisir (PPLP). PPLP merupakan lembaga independen beranggotakan petani pesisir yang menolak penambangan pasir besi di Kulon Progo. Menurut Widodo, aktivis PPLP, lembaga ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan petani Kulon Progo mempertahankan hak di tanahnya sendiri. Masalah klaim atas lahan pesisir menjadi pemicu utama timbulnya konflik antara PPLP, pemerintah, dan JMI. “Yang kami inginkan agar petani Kulon Progo tetap bisa bekerja di lahannya,” tandas Widodo.

Konflik yang ditemukan di Kulon Progo membuat beberapa pihak menyuarakan pendapat, salah satunya Istianto Ari Wibowo, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM menanggapi keadaan tersebut, Istianto menguraikan hasil riset pada daerah-daerah tambang di Indonesia. “Keberadaan industri tambang berdampak pada penambahan angka pengangguran di daerah yang bersangkutan,” papar lelaki setengah baya tersebut. Dalam kasus Kulon Progo, dapat dilihat dari lapangan pekerjaan yang dijanjikan JMI. “Ketika JMI dibangun, hanya dapat menampung dua ribu pekerja untuk tiga ribu jumlah usia produktif,” kritiknya. Dengan mempertimbangkan alasan tersebut, Pustek UGM dengan tegas menolak pelaksanaan penambangan pasir besi di Kulon Progo.

Tanggapan juga muncul dari Drs. Darmakusuma Darmanto, Dip.H.,

M.S., Tim Ahli Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. "Dalam penggarapannya, penambangan pasir besi pasti akan mengganggu keseimbangan ekosistem," kata Darmakusuma. Meski aturan-aturan dalam pengelolaan pasir besi telah diatur dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun pengawasan tetap diperlukan. "Kalau perlu membuat Tim Independen," saran dosen Geografi UGM ini.

Pandangan lain dipaparkan oleh Derajad S. Widhyharto. M.Si, dosen Sosiologi UGM, bahwa kecenderungan penolakan itu karena JMI tidak melibatkan masyarakat secara langsung. "Masyarakat cenderung menolak karena merasa tidak mendapatkan keuntungan langsung seperti saat mereka bertani," papar Derajad. Menurutnya, penambangan yang berlangsung dalam waktu lama serta harus mengorbankan lahan yang dimiliki secara turun-temurun akan membuat masyarakat lebih dirugikan.

Pendekatan sosiologi yang dikemukakan Derajad tak hanya sampai di situ, masyarakat Kulon Progo akan mengalami peralihan mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri. Jika benar akan dilakukan industrialisasi di Kulon Progo, sebaiknya disepakati nilai-nilai industri itu dengan masyarakat. "Tujuannya untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar masyarakat dapat berkompetisi dengan pendatang," imbuh Derajad. Ia berharap masyarakat asli nantinya tidak akan kehilangan mata pencaharian di lahan mereka sendiri.

Tak hanya pertambangan pasir besi, proyek lain seperti pelabuhan juga menimbulkan perubahan di beberapa aspek. Berjarak empat kilometer ke arah barat dari Desa Karangwuni, tepatnya di pesisir Pantai Glagah, dapat dilihat beberapa jenis alat berat yang sedang beraktivitas. Pemecah ombak terhampar sejauh satu kilometer dengan aktivitas pembangunan pelabuhan di sebelah baratnya. Di sebelah timur pemecah

ombak, terlihat aktivitas ekonomi, mulai dari penyewaan kapal hingga warung makan. Kelak, tempat tersebut akan menjadi pusat perekonomian baru di Kulon Progo, yaitu Pelabuhan Tanjung Adi Karta.

Gubernur DIY menginginkan pesisir selatan tersebut menjadi halaman depan industri Yogyakarta. Toyo, Bupati Kulon Progo Periode 2001-2011 mengatakan, pesisir Laut Selatan memiliki potensi perikanan yang besar. "Jika dijadikan pelabuhan perikanan internasional, maka akan menambah jumlah pendapatan masyarakat," jelasnya antusias. Toyo juga menambahkan, posisi pantai yang persis berhadapan Samudra Hindia berpeluang sebagai tempat bersandar perahu besar dan pelelangan ikan tuna. Hingga saat ini, pembangunan kolam parkir kapal juga sudah dimulai.

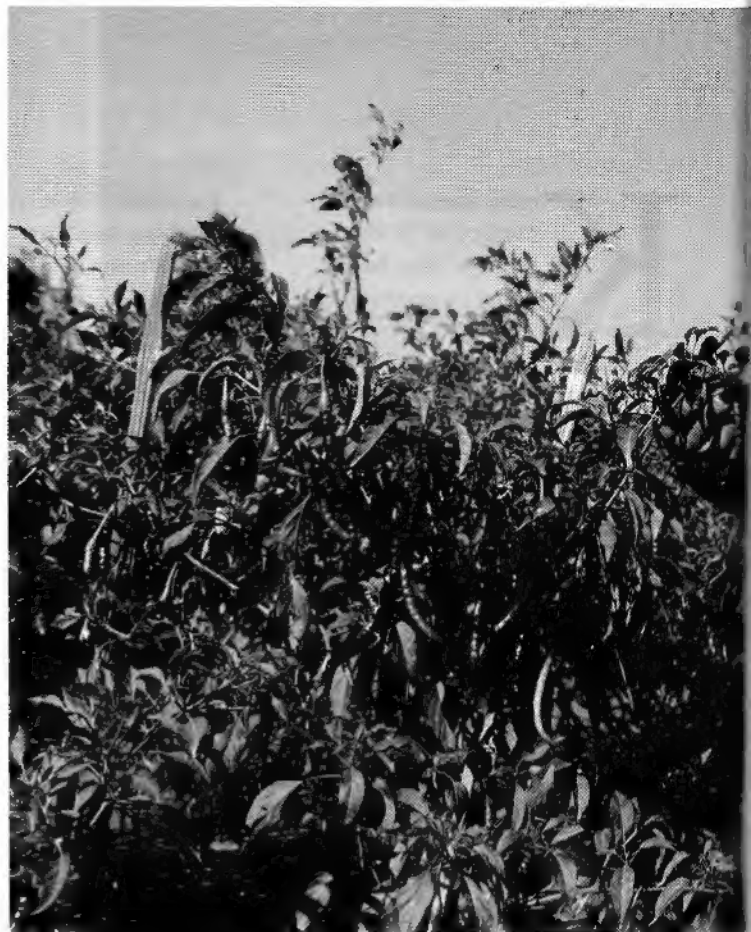
Dalam proyek tersebut, pemerintah tidak mengikutsertakan pihak swasta. Dana pembangunan pelabuhan berasal dari Anggaran Pembayaan Belanja Negara, Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Perikanan, dan Pemprov DIY. Namun, banyaknya pihak yang menanamkan modal mengakibatkan

kelembagaan proyek dipertanyakan. "Masalah kelembagaan ini berkaitan dengan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas proyek Tanjung Adi Karta," ujar 'loyo sembari mengcrutkan dahi. Sampai saat ini, Pemprov DIY belum mendapatkan waktu yang tepat untuk membahas masalah kelembagaan Pelabuhan Tanjung Adi Karta.

Pembangunan yang masih berproses serta pemandangan yang tersuguh di pesisir Pantai Glagah ternyata menarik perhatian wisatawan. Salah satu penjual di warung makan yang ada di sana menjelaskan bahwa tiap akhir minggu pelabuhan tersebut dikunjungi oleh banyak wisatawan. Tak hanya wisatawan, investor dari luar daerah pun mampu mencium potensi bisnis di pesisir Pantai Glagah. Salah satunya adalah calon investor dari Surabaya yang hendak membeli tanah di pesisir pantai. Lelaki Tionghoa tersebut berpendapat bahwa kedepannya daerah Pantai Glagah akan ramai sehingga ia ingin berinvestasi di wilayah tersebut.

Selain pembangunan fisik yang sudah mencapai 75 persen, Heru menuturkan

Foto: BALAIRUNG/ Tojo





Memasuki masa panen, seorang petani lahan pantai di desa Karangrejo, Kulon Progo sedang memetik hasil lahannya. Harga cabai yang dijual bisa mencapai belasan ribu rupiah per-kilo nya.

pengembangan kemampuan masyarakat sekitar. "Akan ada perubahan sistem pencaharian masyarakat dari agraris menjadi maritim," ujar Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DIY ini. Namun, untuk merealisasikan perubahan sistem bukan perkara mudah. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat agar masyarakat mampu beradaptasi. Beberapa upaya dilakukan untuk memperlancar realisasi peralihan sistem mata pencaharian, salah satunya proses magang. "Sudah ada nelayan yang dikirim ke Cilacap untuk pelaksanaan magang," jelas Toyo sembari meminum tehnya.

Proyek lain yang tertuang dalam RTRW DIY adalah Bandara Adi Sutjipto. Heru memaparkan beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi pemindahan bandara tersebut. Adanya situs Boko di sebelah timur dan jembatan layang Janti di sebelah barat menyebabkan sulitnya pengembangan bandara Adi Sutjipto. Heru menyampaikan, pertimbangan pemindahan bandara juga karena lalu lintas udara di Adi Sutjipto yang makin tinggi. Dalam sehari, lebih dari seratus penerbangan yang terdiri dari penerbangan komersial dan latihan

terbang Angkatan Udara menggunakan landasan bandara Adi Sutjipto. "Status kita masih meminjam tempat, jadi pemakaian landasan harus bergantian," papar lelaki berkulit sawo matang tersebut.

Selain itu, bandara tidak mampu menampung pesawat besar, sedangkan kebutuhan transportasi udara semakin meningkat. Ini dilihat dari potensi wisata dan pendidikan DIY yang tinggi. Aksesibilitas untuk menunjang kelancaran aktivitas wisata dan pendidikan pun menjadi penting.

Proyek pembangunan bandara diserahkan kepada PT Angkasa Pura. Sebagai Badan Usaha Bandar Udara, PT Angkasa Pura menjadi mitra pemerintah. Namun, masih ada kemungkinan PT Angkasa Pura akan menjalin kerja sama dengan pemodal lain. Walaupun begitu, belum ada kepastian perusahaan mana yang akan melakukan kerja sama. Di satu sisi, lokasi pembangunan bandara di Kulon Progo belum pasti. "Masih templatif, kalau kondisi Kulon Progo belum stabil ada kemungkinan dipindah ke lokasi lain," ujar Heru.

Pemilihan lokasi pembangunan bandara masih dalam uji kelayakan. Dua

lokasi yang menjadi pilihan pembangunan bandara adalah Bantul dan Kulon Progo. Berbeda dengan Heru, Toyo menyatakan dengan tegas bahwa Kulon Progo lebih siap melaksanakan proyek bandara. "Bantul sudah padat dengan pemukiman warga, sedangkan Kulon Progo relatif lebih lengang," paparnya dengan nada optimis.

Heru menambahkan, masalah fluktuasi harga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan bila bandara tetap dibangun di Kulon Progo. "Tidak ada investor yang mau merugi, oleh karena itu fluktuasi harga menjadi pertimbangan penting," tegasnya. Diharapkan bandara akan menjadi titik pusat perekonomian baru di Kulon Progo dengan investasi penunjang di sekitarnya, seperti hotel, restoran, gudang, dsb.

Penelitian terhadap keadaan daerah Kulon Progo sebagai tempat pembangunan bandara sudah dilakukan selama dua tahun. Hasilnya dinilai aman dengan nilai terbaik dibandingkan Purworejo, Bantul, Gunung Kidul, Klaten, Sleman, Kota Yogyakarta, dan Solo. "Kondisi arah angin, kecepatan angin, arah gelombang laut, dan ketinggian gelombang laut keamanannya lebih baik dan sangat mendukung pembangunan bandara," tandas Toyo.

Menurut Derajad, pembangunan megaprojek di Kulon Progo tersebut merupakan salah satu implementasi RTRW DIY yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Ketika kebijakan itu menyengsarakan rakyat, maka wajib untuk dievaluasi. Dalam megaprojek Kulon Progo tidak sedikit penolakan yang dilakukan masyarakat. Penolakan menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama pembangunan masih dipertanyakan realisasinya. Istianto, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM menambahkan bahwa apa yang terjadi di Kulon Progo adalah cermin dari kondisi di tingkat nasional. Kulon Progo hanya satu dari sekian banyak kasus yang menunjukkan pengelolaan perekonomian nasional. "Saat ini, semakin jelas mengarah kemana, dikendalikan oleh siapa, untuk kepentingan siapa," pungkas Istianto dengan nada serius.